Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,
ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950
Volume 11 Nomor 02, Juni 2026

ANALISIS KEBIJAKAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PLTGU JAWA-1 POWER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN CILAMAYA WETAN, KABUPATEN KARAWANG

Dhifa Sultan Firdaus[1], EkaYulyana[2]
Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email : 2210631180129@student.unsika.ac.id[1], eka.yulyana@staff.unsika.ac.id[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTGU Jawa-1 Power dan implikasinya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Data diperoleh dari dokumen kebijakan pemerintah, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, dokumen perusahaan, artikel ilmiah, dan berbagai sumber pendukung lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTGU Jawa-1 Power berkontribusi terhadap penguatan ketahanan energi nasional, namun juga menimbulkan implikasi sosial-ekonomi bagi masyarakat nelayan. Perubahan tata ruang pesisir menyebabkan berkurangnya akses wilayah tangkap, meningkatnya biaya operasional melaut, serta mendorong diversifikasi mata pencaharian masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur energi menghasilkan konsekuensi multidimensional yang memengaruhi keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi nelayan, penguatan kelembagaan lokal, optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan, dan pemantauan lingkungan pesisir secara berkelanjutan guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan masyarakat lokal.

Kata Kunci: analisis kebijakan, Proyek Strategis Nasional, PLTGU Jawa-1 Power, masyarakat nelayan, kondisi sosial-ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Java-1 Power National Strategic Project (PSN) policy and its implications for the socio-economic conditions of fishing communities in Cilamaya Wetan District, Karawang Regency. This study employed a qualitative approach using literature review and document analysis methods. Data were collected from government policy documents, statistical data, company reports, scientific articles, and other relevant sources. The findings indicate that Java-1 Power contributes to strengthening national energy security while also generating socio-economic implications for fishing communities. Changes in coastal spatial use have reduced access to fishing grounds, increased operational costs, and encouraged livelihood diversification. These findings suggest that energy infrastructure development produces multidimensional consequences that affect the sustainability of coastal livelihoods. Therefore, stronger community participation, economic empowerment programs, local institutional strengthening, optimization of corporate social responsibility programs, and sustainable coastal environmental monitoring are necessary to balance national development objectives with the protection of local communities.

Keywords: policy analysis, National Strategic Project, Java-1 Power, fishing communities, socio-economic conditions.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing nasional melalui percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan investasi, dan mendukung pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan PSN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Salah satu sektor prioritas dalam PSN adalah sektor energi, mengingat ketersediaan energi listrik menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, industri, dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan energi masyarakat.

Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 Power di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. PLTGU Jawa-1 Power merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga gas terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 1.760 MW dan nilai investasi sekitar Rp26 triliun (Katadata.co.id, 2021). Proyek ini dirancang untuk memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali dan mendukung ketahanan energi nasional (Bisnis.com, 2022). Namun, pembangunan infrastruktur berskala besar di kawasan pesisir juga berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial-ekonomi karena wilayah tersebut merupakan ruang hidup masyarakat yang sebagian besar menggantungkan penghidupannya pada sektor perikanan tangkap.

Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Karawang yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sektor perikanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang (2023), sektor perikanan menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Perubahan tata ruang akibat pembangunan PLTGU Jawa-1 Power berpotensi memengaruhi akses wilayah tangkap, pola pendapatan rumah tangga, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat nelayan. Berbagai media dan organisasi masyarakat sipil juga melaporkan adanya perubahan kondisi sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat, seperti berkurangnya ruang hidup nelayan, perubahan lingkungan pesisir, serta tuntutan kompensasi terhadap pihak pengelola proyek (LPM Didaktika, 2024; Filesatu.co.id, 2024; Azzam TV Jabar, 2025). Meskipun demikian, informasi tersebut perlu dikaji secara akademik agar menghasilkan analisis yang objektif dan komprehensif.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir memiliki implikasi yang kompleks terhadap masyarakat lokal. Berliandaldo dan Hendrix (2022) menemukan bahwa pembangunan pembangkit listrik memengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat di sekitar proyek. Sakinah et al. (2024) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pesisir dapat mengubah aktivitas ekonomi dan pola kehidupan masyarakat, sedangkan Fabinyi et al. (2022) menunjukkan bahwa pembangunan kawasan maritim di Asia Tenggara mendorong terjadinya transformasi penghidupan masyarakat nelayan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek lingkungan atau dampak

ekonomi secara parsial. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi kebijakan PSN PLTGU Jawa-1 Power dari perspektif kebijakan publik dan implikasinya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan masih relatif terbatas. Selain itu, keterkaitan antara implementasi kebijakan, perubahan akses sumber daya, dan strategi adaptasi masyarakat nelayan juga belum banyak dikaji.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif kebijakan publik dengan teori Livelihood Transformation dan Theory of Access untuk menganalisis dampak pembangunan PSN terhadap masyarakat nelayan. Perspektif Livelihood Transformation (Scoones, 1998) digunakan untuk memahami perubahan strategi penghidupan masyarakat, sedangkan Theory of Access (Ribot & Peluso, 2003) digunakan untuk menganalisis perubahan akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Proyek Strategis Nasional PLTGU Jawa-1 Power dan implikasinya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*) yang dipadukan dengan analisis dokumen (*document analysis*) untuk menganalisis kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTGU Jawa-1 Power dan implikasinya terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan infrastruktur energi dan perubahan yang terjadi pada masyarakat pesisir (Creswell & Creswell, 2018). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumen regulasi, data statistik pemerintah, dokumen perusahaan, artikel ilmiah, laporan organisasi masyarakat sipil, dan berita media massa yang relevan. Dokumen regulasi yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Data statistik diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, sedangkan dokumen perusahaan bersumber dari laporan keberlanjutan dan laporan tanggung jawab sosial PT Jawa Satu Power. Penelusuran artikel ilmiah dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, SINTA, dan Scopus dengan kriteria publikasi tahun 2021–2025 yang relevan dengan pembangunan infrastruktur, kebijakan publik, dan masyarakat pesisir. Data pendukung juga diperoleh dari media massa nasional yang kredibel, seperti Katadata, Bisnis Indonesia, Kumparan, dan Mongabay Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, dan klasifikasi sumber berdasarkan tema penelitian, yaitu kebijakan pembangunan, kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan, perubahan akses sumber daya, dan strategi adaptasi masyarakat pesisir. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Penelitian ini menggunakan dua perspektif teoritis sebagai pisau analisis, yaitu *Livelihood Transformation* dari Scoones (1998) untuk menganalisis perubahan strategi penghidupan

masyarakat nelayan serta *Theory of Access* dari Ribot dan Peluso (2003) untuk menganalisis perubahan akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir. Integrasi kedua perspektif tersebut digunakan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan nasional, akses sumber daya, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Proyek Strategis Nasional PLTGU Jawa-1 Power dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Pembangunan infrastruktur energi merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah berupaya mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur strategis merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional.

Salah satu proyek yang termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 Power yang berlokasi di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Proyek ini dibangun sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat sistem kelistrikan Jawa-Bali yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional. PLTGU Jawa-1 Power memiliki kapasitas pembangkit sebesar 1.760 megawatt (MW) dan menjadi salah satu pembangkit listrik berbasis gas terbesar di Asia Tenggara (Bisnis.com, 2022). Pembangunan PLTGU Jawa-1 Power juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pembangunan pembangkit listrik tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur semata, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk mendukung ketahanan energi nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Dari perspektif pembangunan nasional, keberadaan PLTGU Jawa-1 Power memberikan beberapa manfaat strategis. Pertama, proyek ini mampu meningkatkan kapasitas pasokan listrik nasional yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Kedua, pembangunan PLTGU berbasis gas dinilai lebih efisien dan memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan pembangkit berbasis batu bara sehingga mendukung agenda transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, proyek ini berkontribusi terhadap peningkatan investasi di sektor energi nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja (Katadata.co.id, 2021).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur energi di wilayah pesisir juga menghadirkan tantangan tersendiri. Pembangunan yang berorientasi pada kepentingan nasional sering kali berhadapan dengan kepentingan masyarakat lokal yang telah lama menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir. Dalam konteks Kecamatan Cilamaya Wetan, sebagian besar masyarakat pesisir berprofesi sebagai nelayan yang memiliki ketergantungan tinggi

terhadap akses wilayah tangkap dan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, perubahan tata ruang yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi dan keberlanjutan penghidupan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, keterpaduan, dan perlindungan terhadap masyarakat pesisir. Artinya, pembangunan infrastruktur strategis nasional tidak hanya dituntut untuk mencapai target ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan agar tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan.

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak secara langsung. Menurut Dye (2017), kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai keputusan pemerintah, tetapi juga mencakup konsekuensi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut terhadap masyarakat. Dengan demikian, evaluasi terhadap implementasi PSN PLTGU Jawa-1 Power menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembangunan dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlangsungan kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan.

Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan (Versi Revisi)

Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Karawang yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang sangat bergantung pada sektor perikanan tangkap. Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi maritim di Kabupaten Karawang. Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya pesisir menyebabkan sektor perikanan memiliki peran yang strategis dalam menopang keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, setiap perubahan tata ruang dan aktivitas pembangunan di wilayah pesisir berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan.

Secara kelembagaan, sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Karawang. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki panjang garis pantai mencapai 84,23 kilometer dengan jumlah nelayan sebanyak 8.112 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.559 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan 6.553 Rumah Tangga Buruh Perikanan (RTBP). Selain itu, aktivitas perikanan didukung oleh 1.499 unit kapal penangkapan ikan yang terdiri atas 910 kapal motor dan 589 kapal motor tempel. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Karawang. Keberadaan Kecamatan Cilamaya Wetan sebagai salah satu pusat aktivitas perikanan juga ditunjukkan oleh tersedianya beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berfungsi sebagai sarana distribusi hasil tangkapan nelayan. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Karawang mencatat terdapat empat TPI yang berada di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, yaitu TPI Tangkolak di Desa Sukakerta, TPI Prahubosok, TPI Satar, dan TPI Muara yang berada di Desa Muara Baru. Keberadaan infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat setempat memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sektor perikanan tangkap.

Di sisi lain, pembangunan PLTGU Jawa-1 Power sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional menghadirkan dinamika baru dalam tata kelola wilayah pesisir. Pembangunan infrastruktur energi berskala besar di kawasan pesisir berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap wilayah tangkap yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama. Menurut Ribot dan Peluso (2003), akses tidak hanya dipahami sebagai hak kepemilikan formal atas sumber daya, tetapi juga kemampuan individu maupun kelompok dalam memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut. Oleh karena itu, perubahan tata ruang pesisir dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat nelayan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan akses terhadap sumber daya pesisir dapat mendorong terjadinya transformasi penghidupan (livelihood transformation). Fabinyi et al. (2022) menjelaskan bahwa pembangunan kawasan maritim di Asia Tenggara telah menyebabkan pergeseran struktur pekerjaan masyarakat pesisir, dari sektor perikanan menuju sektor nonperikanan. Fenomena tersebut umumnya ditandai dengan diversifikasi mata pencaharian, perubahan struktur pendapatan rumah tangga, dan meningkatnya ketergantungan terhadap pekerjaan informal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi, tetapi juga memengaruhi struktur sosial masyarakat secara lebih luas.

Kondisi serupa juga terlihat pada masyarakat nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan. Beberapa kajian menyebutkan bahwa setelah beroperasinya PLTGU Jawa-1 Power, masyarakat nelayan menghadapi berbagai tantangan, seperti berkurangnya akses wilayah tangkap, perubahan ekosistem pesisir, serta kebutuhan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Penelitian mengenai strategi adaptasi nelayan di Cilamaya Wetan juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan diversifikasi usaha dan pengembangan sumber pendapatan alternatif sebagai bentuk respons terhadap perubahan yang terjadi. Dari perspektif kerentanan sosial (social vulnerability), kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat nelayan merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan kebijakan pembangunan. Adger (2006) menjelaskan bahwa kerentanan sosial muncul ketika kapasitas masyarakat untuk beradaptasi tidak sebanding dengan besarnya perubahan yang terjadi. Dalam konteks Kecamatan Cilamaya Wetan, kerentanan tersebut dapat terlihat dari ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya pesisir, keterbatasan pilihan mata pencaharian, serta perubahan akses terhadap wilayah tangkap akibat pembangunan infrastruktur.

Indikator	Jumlah
Panjang garis pantai	84,23 km
Jumlah nelayan	8.112 orang
Rumah Tangga Perikanan (RTP)	1.559
Rumah Tangga Buruh Perikanan (RTBP)	6.553
Kapal penangkapan ikan	1.499 unit

(Bersumber dari Renstra Dinas Perikanan 2021–2026)

Implikasi Pembangunan PLTGU Jawa-1 Power terhadap Akses Sumber Daya dan Penghidupan Nelayan

Pembangunan PLTGU Jawa-1 Power sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan implikasi yang kompleks terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan. Di satu sisi, proyek ini berkontribusi

terhadap penguatan ketahanan energi nasional, tetapi di sisi lain menimbulkan perubahan pada sistem penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah berkurangnya akses terhadap wilayah tangkap akibat perubahan fungsi ruang pesisir dan aktivitas pendukung operasional proyek. Kondisi tersebut membatasi ruang gerak nelayan, meningkatkan jarak tempuh pelayaran, serta menambah biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk memperoleh hasil tangkapan.

Temuan ini sejalan dengan *Theory of Access* yang dikembangkan oleh Ribot dan Peluso (2003), yang menjelaskan bahwa akses terhadap sumber daya tidak hanya ditentukan oleh hak kepemilikan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mempertahankan manfaat dari sumber daya tersebut. Artikel Bandung Bergerak (2025) menunjukkan bahwa pembangunan PLTGU Jawa-1 Power telah memicu dekonstruksi ruang hidup masyarakat nelayan di Cilamaya Wetan yang ditandai dengan terbatasnya akses terhadap wilayah tangkap tradisional. Kondisi tersebut tidak hanya mengubah lanskap fisik kawasan pesisir, tetapi juga memengaruhi relasi sosial dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga nelayan.

Perubahan akses wilayah tangkap berdampak pada meningkatnya biaya bahan bakar, waktu operasional, dan risiko kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan rumah tangga nelayan, terutama pada kelompok nelayan skala kecil yang memiliki keterbatasan modal. Warren dan Steenbergen (2021) menjelaskan bahwa berkurangnya akses terhadap sumber daya perikanan dapat memicu konflik tata kelola dan meningkatkan kerentanan ekonomi masyarakat pesisir. Di sisi lain, kondisi tersebut mendorong terjadinya transformasi penghidupan (*livelihood transformation*) melalui diversifikasi mata pencaharian sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan yang terjadi (Fabinyi et al., 2022).

Dari perspektif sosial, masyarakat nelayan merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan kebijakan pembangunan karena tingginya ketergantungan terhadap sumber daya pesisir dan terbatasnya sumber pendapatan alternatif. Adger (2006) menjelaskan bahwa kerentanan sosial muncul ketika kapasitas adaptasi masyarakat tidak mampu mengimbangi perubahan yang terjadi. Selain berdampak pada aspek ekonomi, perubahan ini juga memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat yang sebelumnya berpusat pada aktivitas perikanan. Huraerah (2024) menyebutkan bahwa perubahan sosial merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam proses pembangunan dan akan memengaruhi struktur serta hubungan sosial dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan PLTGU Jawa-1 Power perlu dipahami tidak hanya sebagai proyek infrastruktur energi, tetapi juga sebagai kebijakan publik yang memiliki implikasi sosial jangka panjang. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan publik harus mempertimbangkan pencapaian tujuan pembangunan sekaligus konsekuensi yang ditimbulkan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat mekanisme perlindungan masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif, seperti penyediaan kompensasi yang transparan, pemberdayaan ekonomi nelayan, pengembangan keterampilan kerja alternatif, dan optimalisasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur energi dapat

dilaksanakan secara lebih berkelanjutan melalui keseimbangan antara kepentingan ekonomi nasional, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Masyarakat nelayan di Kecamatan Cilamaya Wetan merupakan kelompok yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya pesisir sebagai sumber utama penghidupan. Perubahan tata ruang akibat pembangunan PLTGU Jawa-1 Power sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional menuntut masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian agar mampu mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Proses penyesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kelembagaan, dan kemampuan masyarakat dalam merespons perubahan lingkungan yang terjadi.

Berdasarkan perspektif Sustainable Livelihood Framework, strategi adaptasi merupakan upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki agar mampu menghadapi tekanan eksternal yang memengaruhi keberlanjutan penghidupan (Scoones, 1998). Dalam konteks Kecamatan Cilamaya Wetan, strategi adaptasi dapat dilakukan melalui diversifikasi mata pencaharian, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta.

Salah satu strategi adaptasi yang dapat dikembangkan adalah diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor perikanan menyebabkan masyarakat menjadi rentan ketika terjadi perubahan akses terhadap wilayah tangkap. Oleh karena itu, pengembangan sumber pendapatan alternatif perlu didorong melalui sektor usaha mikro, pengolahan hasil perikanan, budidaya perikanan, perdagangan, serta pengembangan usaha berbasis ekonomi kreatif. Fabinyi et al. (2022) menjelaskan bahwa diversifikasi pekerjaan merupakan salah satu bentuk adaptasi yang umum dilakukan oleh masyarakat pesisir di Asia Tenggara untuk mengurangi kerentanan ekonomi akibat perubahan lingkungan dan pembangunan kawasan maritim.

Selain diversifikasi ekonomi, penguatan kelembagaan nelayan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat. Kelompok nelayan memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi, memperluas akses informasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas organisasi nelayan, pendampingan administrasi kelompok, serta penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya tersebut penting untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif.

Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha produktif. Program tersebut dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pengolahan hasil perikanan, kewirausahaan, pemasaran digital, dan pengelolaan usaha mikro. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas penangkapan ikan semata. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika pembangunan yang terjadi di wilayah pesisir.

Di sisi lain, perusahaan pengelola PLTGU Jawa-1 Power perlu memperkuat

implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) secara berkelanjutan. Program CSR tidak hanya difokuskan pada bantuan yang bersifat jangka pendek, tetapi perlu diarahkan pada pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Bentuk program yang dapat dikembangkan antara lain bantuan peralatan usaha, pelatihan kewirausahaan, pengembangan koperasi nelayan, serta dukungan terhadap pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan sistem pemantauan dan evaluasi lingkungan pesisir. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi ekosistem pesisir untuk memastikan bahwa aktivitas pembangunan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang dapat memperbesar kerentanan masyarakat nelayan. Pemantauan tersebut dapat mencakup kualitas perairan, sedimentasi, kondisi wilayah tangkap, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Langkah ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, pembangunan infrastruktur berskala besar memerlukan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih kuat. Howlett, Ramesh, dan Perl (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktor yang terdampak secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, masyarakat nelayan perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

PENUTUP

Implementasi kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTGU Jawa-1 Power di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, menghasilkan konsekuensi multidimensional bagi masyarakat pesisir. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur energi berkapasitas 1.760 MW dengan investasi Rp26 triliun ini berkontribusi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, menyokong sistem kelistrikan Jawa-Bali, serta menurunkan emisi karbon melalui penggunaan gas. Namun di sisi lain, proyek ini memicu dekonstruksi ruang hidup masyarakat nelayan lokal.

Perubahan tata ruang pesisir secara langsung mengurangi akses nelayan terhadap wilayah tangkap tradisional mereka. Pembatasan ini meningkatkan jarak tempuh pelayaran, menaikkan biaya operasional (seperti bahan bakar), dan memperbesar risiko kerja, yang pada akhirnya menekan pendapatan rumah tangga nelayan, khususnya nelayan skala kecil. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat yang memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap sektor perikanan tangkap.

Sebagai respons, masyarakat nelayan mulai melakukan transformasi penghidupan melalui diversifikasi mata pencaharian ke sektor nonperikanan. Guna mewujudkan keseimbangan antara pembangunan nasional dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah serta pemangku kepentingan direkomendasikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, mengoptimalkan program CSR jangka panjang PT Jawa Satu Power, memberikan pemberdayaan ekonomi, memperkuat kelembagaan lokal, serta melakukan pemantauan lingkungan pesisir secara berkelanjutan.

REFERENSI

Adger, W. N. (2006). Vulnerability. Global Environmental Change, 16(3), 268–281. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2023). Karawang dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2025). Kabupaten Karawang dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang.

Bandung Bergerak. (2025). Dekonstruksi ruang hidup nelayan Cilamaya di bawah bayang-bayang PLTGU Jawa-1 sebagai Proyek Strategis Nasional. https://bandungbergerak.id/article/detail/1546036630/dekonstruksi-ruang-hidup-nelayan-cilamaya-di-bawah-bayang-bayang-pltgu-jawa-1-sebagai-proyek-strategis-nasional

Bisnis.com. (2022, Februari 7). PLTGU Jawa-1 jadi pembangkit listrik gas terbesar di Asia Tenggara. https://ekonomi.bisnis.com/read/20220207/44/1497848/pltgu-jawa-1-jadi-pembangkit-listrik-gas-terbesar-di-asia-tenggara

Dinas Perikanan Kabupaten Karawang. (2021). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026. Pemerintah Kabupaten Karawang.

Fabinyi, M., Belton, B., Dressler, W. H., Knudsen, M., Adhuri, D. S., Aziz, A. A., et al. (2022). Coastal transitions: Small-scale fisheries, livelihoods, and maritime zone developments in Southeast Asia. Journal of Rural Studies, 91, 184–194. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.02.006

Huraerah, A. (2024). Perubahan sosial dan implikasinya terhadap pembangunan kesejahteraan sosial: Tantangan bagi peneliti dan praktisi kesejahteraan sosial. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 7(2), 221–227. https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60229

Katadata.co.id. (2021, Desember 15). PLTGU Jawa-1 siap beroperasi, proyek strategis nasional bernilai Rp26 triliun. https://katadata.co.id/sorotan/energi/61b8c03fb43f2/pltgu-jawa-1-siap-beroperasi-proyek-strategis-nasional-bernilai-rp-26-triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Statistik ketenagalistrikan Indonesia 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Laporan perkembangan Proyek Strategis Nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Mongabay Indonesia. (2022, Februari 24). Menyoal transisi energi dan ketimpangan dampaknya di wilayah pesisir. https://www.mongabay.co.id/2022/02/24/menyoal-transisi-energi-dan-ketimpangan-dampaknya-di-wilayah-pesisir

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007)

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (perubahan ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016)

PT Jawa Satu Power. (2024). Laporan keberlanjutan (sustainability report). PT Jawa Satu Power.

Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. Rural Sociology, 68(2), 153–181. https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x

Saragih, M. (2024). Riset pemetaan kerentanan sosial-ekonomi nelayan kecil terkait dampak perubahan iklim, akses terhadap energi (BBM), dan akses wilayah tangkap. EcoNusa Foundation.

Scoones, I. (1998). Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis (Working Paper No. 72). Institute of Development Studies.

Sundari, S., A'yuni, D. S., & Prahara, R. S. (2023). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 6(4), 773–788. https://doi.org/10.31538/almada.v6i4.4478

Warren, C., & Steenbergen, D. J. (2021). Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance: An Indonesian case. Ocean & Coastal Management, 202, 105498. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105498